

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Penelitian tentang pengaruh *corporate governance* dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia membutuhkan kajian teori sebagai berikut :

1. Teori Agensi

Agency Theory menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen. Teori mengenai hubungan keagenan ini digunakan dalam rangka untuk memahami *corporate governance* lebih dalam. Pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang disebut dengan konflik keagenan.

Ali (2002) menyatakan bahwa manajer berkewajiban memberikan pengungkapan informasi melalui laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidak pastiannya. Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi dapat menjadi pemicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*).

Fuad (2005) menyatakan bahwa masalah agensi telah menarik perhatian yang sangat besar dari para peneliti di bidang akuntansi

keuangan. Masalah agensi timbul karena adanya konflik kepentingan antara *shareholder* dan manajer, karena tidak bertemunya utilitas yang maksimal antara mereka. Manajer (*agent*) sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (*prinsipal*). Sehingga ada kemungkinan besar *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal* (Jensen dan Meckling, 1976).

Adanya asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat membuka peluang bagi manajer untuk melakukan tindakan *earnings management* dalam rangka mengelabui pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Dalam hal ini apabila manajer memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pemilik saham, maka manajer akan cenderung melakukan kecurang dengan melakukan praktik manajemen laba untuk meningkatkan keuntungannya sendiri.

Munculnya masalah agensi yang disebabkan konflik kepentingan dan asimetri informasi tersebut dapat membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Teori agensi menyatakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi yang muncul dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan berbagai pihak di perusahaan. Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme *corporate governance*.

2. Teori Sinyal

Signaling Theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain.

Wolk et al (2002) menyatakan bahwa *Signaling theory* menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal, karena terdapat asimetri informasi (*Asymmetri Information*) antara perusahaan dan pihak luar. Perusahaan (*agent*) mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor, kreditor). Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan mengurangi asimetri informasi. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang.

Teori signal juga dapat membantu pihak perusahaan (*agent*), pemilik (*prinsipal*), dan pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas atau integritas informasi laporan keuangan.

Untuk memastikan pihak-pihak yang berkepentingan menyakini keandalan informasi keuangan yang disampaikan pihak perusahaan (*agent*), perlu mendapatkan opini dari pihak lain yang bebas memberikan pendapat tentang laporan keuangan. Signal opini bebas yang diberikan oleh kantor akuntan publik (KAP) merupakan signal yang mencerminkan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan perusahaan yang telah di audit. Kualitas kantor akuntan publik (KAP) juga dapat memberikan signal kepercayaan pihak perusahaan (*agent*), pemilik (*prinsipal*), dan pihak-pihak lain yang berkepentingan atas legalitas dan integritas opini bebas yang dikeluarkan akuntan.

Haris (2004) menyatakan bahwa manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik (*prinsipal*). Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Akan tetapi sinyal informasi yang disampaikan *agent* terkadang diterima *principal* tidak sesuai dengan kondisi dan ukuran keberhasilan perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*).

3. Konservatisme

Mulyadi (2002) mendefinisikan integritas sebagai prinsip moral yang tidak memihak dan jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya. Mayangsari dalam Jama'an (2008: 2) mendefinisikan integritas laporan keuangan sebagai ukuran sejauh mana laporan keuangan yang

disajikan menunjukkan informasi yang jujur dan benar sehingga tidak menyesatkan para pengguna dalam membuat keputusan. Menurut Pancawati Hardiningsih (2010: 65), integritas laporan keuangan merupakan laporan yang menampilkan kondisi perusahaan yang sebenarnya tanpa ada yang disembunyikan. Berdasarkan berbagai pengertian integritas laporan keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa integritas laporan keuangan merupakan penyajian laporan keuangan secara jujur dengan menggambarkan realitas ekonomi perusahaan sesungguhnya.

Laporan keuangan sebagai hasil akhir dari proses akuntansi memuat informasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu yang bermanfaat bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan berbagai sumber daya yang telah dipercayakan pengelolaannya kepada mereka (SAK, 2007: 1, 3).

4. Integritas Laporan keuangan

Wibowo (2002) menyatakan bahwa Integritas informasi laporan keuangan menyangkut keandalan informasi akuntansi yang dihasilkan yaitu kejujuran dalam penyajian, dapat dipercaya, dan netralitas, sedangkan konservatisme adalah prinsip dalam pelaporan keuangan yang dimaksudkan untuk mengakui dan mengukur aktiva dan laba dilakukan dengan penuhkehati-hatian oleh karena aktivitas ekonomidan bisnis yang dilingkupi ketidakpastian. Banyak praktik-praktik akuntansi dan pelaporan memerlukan pertimbangan disebabkan kejadian ekonomi mendatang yang tidak pasti.

Kieso (2001) menyatakan bahwa laporan keuangan seharusnya memberikan informasi yang berguna untuk investor dan kreditor dan potensial untuk membuat keputusan investasi, kredit dan keputusan lain yang sejenis seperti yang dinyatakan dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) No.1. Laporan keuangan dikatakan berintegritas apabila laporan keuangan tersebut memenuhi kualitas reliability dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.

Mayangsari (2005) laporan keuangan yang *reliable* atau berintegritas dapat dinilai dengan cara penggunaan prinsip konservatisme dan penggunaan *earning management* karena informasi dalam laporan keuangan akan lebih reliable apabila laporan keuangan tersebut konservatif dan laporan keuangan tersebut tidak *overstate* supaya tidak ada pihak yang dirugikan akibat informasi dalam laporan keuangan tersebut.

5. *Corporate Governance*

Corporate Governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan *stakeholders* lainnya yang juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni, Khomsiyah dan Rika, 2004).

Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Korporat pemerintahan yang baik dapat memberikan rangsangan bagi dewan direksi dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham yang harus memfasilitasi pengawasan sehingga efektif mendorong menggunakan sumber daya perusahaan yang lebih efisien.

6. **Kepemilikan Institusional**

Susiana dan Herawaty (2007) menyatakan bahwa persentase saham institusi diperoleh dari penjumlahan atas persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Keberadaan investor dapat menunjukkan *Corporate Governance* yang kuat yang bisa digunakan untuk memonitor perusahaan pada umumnya dan manajemen pada khususnya. Tindakan monitoring tersebut dapat menjamin kemakmuran untuk pemegang saham.

McConell dan Servaes (1990), Nesbitt (1994), Smith (1996), Del Guercio dan Hawkins (1999), dan Hartzell dan Starks (2003) dalam Cornertt et al., (2006) menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor insitusional dapat membatasi perilaku para manajer.

Mitra (2002), Koh (2003), dan Pratana dan Mas'ud (2003) juga menyatakan bahwa kehadiran kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba.

7. Komite Audit

Susiana dan Herawaty (2007) menyatakan bahwa komite audit merupakan badan yang dibentuk oleh dewan direksi untuk mengaudit operasi dan keadaan. Badan ini bertugas memilih dan menilai kinerja perusahaan kantor akuntan publik. Komite audit adalah suatu badan yang dibentuk didalam perusahaan klien yang bertugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen (Supriyono, 1998).

Komite audit berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Tujuan pembentukan komite audit adalah:

- a. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum.
- b. Memastikan bahwa internal kontrolnya memadai.

- c. Menindaklanjuti terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya.

Pembentukan komite audit dan komisaris independen sudah diatur dalam regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia dan Bapepam, antara lain sebagai berikut:

- a. Keputusan Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A yang antara lain mengatur tentang kewajiban mempunyai Komisaris Independen, Komite Audit, memberikan peran aktif Sekretaris Perusahaan di dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi serta mewajibkan perusahaan tercatat untuk menyampaikan informasi yang material dan relevan.
- b. Surat Edaran Ketua Bapepam-LK Nomor SE-03/PM/2000 tentang Komite Audit yang berisi himbauan perlunya komite Audit dimiliki oleh setiap Emiten.
- c. Surat Edaran Ketua Bapepam-LK Nomor SE-07/PM/2004 yang dijelaskan dalam peraturan Nomor IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerjakomite Audit.

8. Komisaris Independen

Emirzon (2007) menyatakan bahwa komisaris independen merupakan sebuah badan perusahaan yang biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam

pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait (Susiana & Herawati, 2007).

Komisaris independen diukur dengan proporsi antara jumlah komisaris independen dengan seluruh total anggota dewan komisaris perusahaan. Penelitian Evans et al. (2002) menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan positif yang secara statistik signifikan antara rasio komisaris independen dengan kinerja perusahaan. FÜRST dan Kang (2004) menyatakan bahwa menguji *corporate governance* dan kinerja operasi, menunjukkan adanya hubungan positif antara komisaris independen dengan kinerja perusahaan. Beasley (1996) menguji hubungan antara proporsi dewan komisaris dengan kecurangan pelaporan keuangan. Dengan membandingkan perusahaan yang melakukan kecurangan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan, mereka menemukan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki persentase dewan komisaris eksternal yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan.

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan

fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

9. Kualitas Audit

Audit adalah proses sistematis mengenai mendapatkan dan mengevaluasi secara objektif bukti yang berkaitan dengan penilaian mengenai berbagai kegiatan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penilaian-penilaian tersebut dan membentuk kriteria serta menyampaikan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan (Hall dan Singleton (2009: 3).

Kualitas audit menurut *Financial Accounting Committee* (2000). Hardiningsih (2010) menyatakan bahwa kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi. Kualitas audit sebagai suatu kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Auditor spesialis industri menggambarkan keahlian dan pengalaman audit seorang auditor pada bidang industri tertentu yang diprosikan dengan jasa audit pada bidang industri tertentu. Auditor tersebut memiliki pengetahuan yang spesifik dan mendalam serta berpengalaman dalam suatu bidang industri tertentu (Hardiningsih, 2010). Penelitian-penelitian sebelumnya membedakan kualitas auditor berdasarkan perbedaan *big four* dan *nonbig four* dan ada juga yang menggunakan spesialisasi industri auditor untuk memberi nilai bagi kualitas audit ini seperti penelitian (Mayangsari, 2003). Kualitas audit dapat menunjukkan betapa pentingnya peran auditor dalam

melakukan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan sehingga diperoleh laporan keuangan yang dapat diandalkan dan wajar.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
1	Anita Indrasari, Willy Sri Yuliandhari dan Dedik Nur Triyanto (2010)	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan <i>Financial Distress</i> terhadap Integritas Laporan Keuangan	Komisaris Independen, Komite Audit dan <i>Financial Distress</i>	Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan sedangkan <i>Financial Distress</i> berpengaruh negatif terhadap Integritas Laporan Keuangan
2	Dewanti Oktadella (2011)	Analisis <i>Corporate Governance</i> terhadap Integritas Laporan Keuangan	Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Komisaris Independen	Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan
3	Jamaan (2008)	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> dan Kualitas Kantor Akuntan Publik terhadap Integritas Laporan Keuangan	Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit	Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan
4	Mulyanto, Drs Eddy Budiono. MM.,	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Kualitas Audit dan	Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan	Kepemilikan Institusional, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan

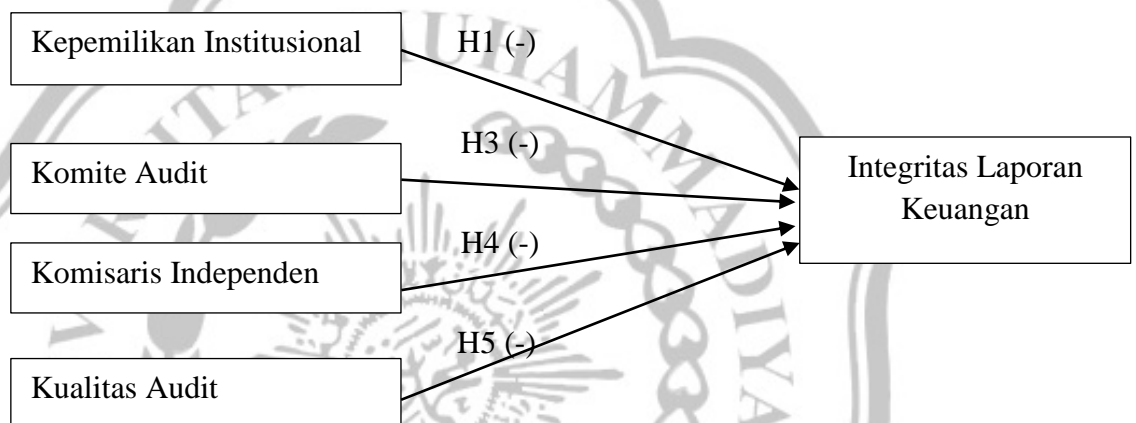
No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Variabel	Hasil
	QIA. (2008)	Ukuran Perusahaan terhadap Integritas Laporan Keuangan		berpengaruh signifikan terhadap Integritas Laporan Keuangan
5	Pancawati Hardining sih (2010)	Pengaruh Independensi, <i>Corporate Governance</i> , dan Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan	Independensi Auditor, Komite Audit, Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kualitas Audit	Independensi Auditor, Komite Audit, Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap Integritas Laporan Keuangan

C. Kerangka Pemikiran

Mulyadi (2004) mendefinisikan integritas laporan keuangan sebagai prinsip moral yang tidak memihak, jujur, seseorang yang berintegritas tinggi memandang fakta seperti apa adanya dan mengemukakan fakta tersebut seperti apa adanya. Integritas laporan keuangan merupakan salah satu komponen penting dalam pelaporan keuangan. Hal tersebut terlihat dari manfaat yang diperoleh pemakai informasi risiko dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan.

Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini menggambarkan secara garis besar suatu rangkaian pemikiran yang didasarkan pada telaah pustaka dan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan integritas laporan keuangan.

Berdasarkan urutan teoritis dan tinjauan penelitian diatas, maka variabel independen penelitian adalah kepemilikan institusional, komite audit, komisararis independen, kualitas audit sedangkan variabel dependennya adalah Integritas laporan keuangan. Berdasarkan hubungan diantara variabel tersebut dapat digambarkan kedalam kerangka sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Integritas Laporan Keuangan

Menurut Bushee (1998) kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan yang intensif. Kepemilikan institusional dalam perusahaan dapat meningkatkan *monitoring* terhadap

perilaku manajer dalam mengantisipasi manipulasi yang mungkin dilakukan sehingga dapat meningkatkan integritas laporan keuangan.

Kepemilikan institusional diukur dari persentase antara saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan banyaknya saham yang beredar. Kepemilikan institusional adalah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi (Beiner et al.,2003). Jiambalvo et al.,(1996) menemukan bahwa nilai absolut diskresioner berhubungan negatif dengan kepemilikan investor institusional. Gidion (2005) persentase saham tertentu yang dimiliki institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemenn. Cornet et al., (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku opportunistic atau mementingkan diri sendiri.

McConnell dan Servaes (1990), Nesbitt (1994), Smith (1996), Del Guercio dan Hawkins (1999), dan Hartzell dan Starks (2003) dalam Cornertt et al., (2006) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor insitusional dapat membatasi perilaku para manajer. Mitra (2002), Koh (2003), dan Pratana dan Mas'ud (2003) juga menemukan bahwa kehadiran kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk

melakukan pengelolaan laba. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Kepemilikan institusional secara statistik berpengaruh negative terhadap integritas laporan keuangan

2. Pengaruh Komite Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan

Komite audit merupakan salah satu komite yang memiliki peranan penting dalam *corporate governance*. Komite audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan dan yang memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu cara auditor mempertahankan independensinya adalah dengan membentuk komite audit (Supriyono, 1998). Fungsi dan tujuan dibentuknya komite audit ialah memastikan laporan keuangan yang dihasilkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum, maka sedikit banyak keberadaan dan efektivitas komite audit dalam perusahaan berpengaruh terhadap kualitas dan integritas laporan keuangan yang dihasilkan.

Komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan emiten industri manufaktur. Hasil pengujian ini bertentangan dengan Keputusan Ketua BAPEPAM, Keputusan Menteri BUMN, dan Undang-undang BUMN yang menyatakan bahwa pembentukan komite audit merupakan suatu keharusan, dimana komite audit merupakan salah satu komite yang memiliki peranan penting dalam

corporate governance. Data hasil perhitungan menunjukkan bahwa sudah semua perusahaan mempunyai komite audit, namun pada kenyataannya peran komite audit belum efektif. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan hanya menekankan pada kepatuhan terhadap peraturan dan belum mengevaluasi tingkat keefektifan dari komite audit tersebut.

Klein (2002) memberikan bukti secara empiris bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen melaporkan laba dengan kandungan akrual diskresioner yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit independen. Kandungan *discretionary accruals* tersebut berkaitan dengan kualitas laba perusahaan. Price Waterhouse (1980) dalam McMullen (1996) menyatakan bahwa investor, analis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan. Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui dewan komisaris. Dan audit disini berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada komite melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan . Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Komite Audit secara statistik berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.

3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Integritas Laporan Keuangan

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate*

governance. Keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi integritas suatu laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas.

Penelitian Evans *et al.* (2002) melaporkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan positif yang secara statistik signifikan antara rasio komisaris independen dengan kinerja perusahaan. Penelitian FÜRST dan Kang (2004) menguji *corporate governance* dan kinerja operasi, menunjukkan adanya hubungan positif antara komisaris independen dengan kinerja perusahaan. Beasley (1996) menguji hubungan antara proporsi dewan komisaris dengan kecurangan pelaporan keuangan. Dengan membandingkan perusahaan yang melakukan kecurangan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan, mereka menemukan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki persentase dewan komisaris eksternal yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecurangan. Dan komisaris independen disini berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada kinerja perusahaan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃: Komisaris Independen secara statistik berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan.

4. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Integritas Laporan Keuangan

Li Dang et al, 2004, O Keefe 1994 menyatakan bahwa auditor *industry specialization* berhubungan positif dengan kualitas audit. Auditor yang memiliki banyak klien dalam industri yang sama akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang risiko. Tambahan keahlian ini akan menghasilkan return positif dalam *fee* audit, sehingga para peneliti memiliki hipotesis bahwa auditor dengan konsentrasi tinggi dalam industri tertentu akan memberikan kualitas yang lebih tinggi. Mayangsari 2003 melakukan penelitian pengaruh spesialisasi industri auditor sebagai proksi lain dari kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa spesialisasi auditor berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

Pancawati Hardiningsih (2010) yang menunjukkan bahwa kualitas audit yang diproksi dengan spesialisasi auditor di bidang industri klien tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Teori agensi dapat diperluas guna menjelaskan *audit brand namedan* spesialisasi industri sebagai suatu fungsi peningkatan kos agensi. Karakteristik industri suatu perusahaan mungkin lebih besar dibandingkan perusahaan lain. Kombinasi faktor-faktor khusus perusahaan dan industrimenghasilkan variasi permintaan terhadap pengawasan dan kualitas audit sebagai konsekuensinya (Pancawati Hardiningsih, 2010: 71). Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₄ : Kualitas Audit secara statistik berpengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan